

***Self Assessment* sebagai Praktik Baik Menyiapkan Akreditasi Perpustakaan**

Hariyah

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jl.M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
hariyah@kemenag.go.id

Abstrak

Building a professional library can be cultivated one of them through the application of library standards. In practice the application of library standards is not always easy especially in the framework of library accreditation. This paper raises the experience of libraries in the Research and Development and Training Center of the Ministry of Religious Affairs, namely the Manado Religious Training Center Library and the Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Library in conducting self assessment using library standards. The instrument used to conduct the self assessment is entirely taken from the Indonesian National Standard for Special Libraries of Government Agencies with additional modifications that are adapted to the state of the library. The instruments featured in this paper include the functions of libraries, collections, organizing library materials, human resources, managers, library services, library organizations, buildings, equipment, budgets, and information and communication technology.

Abstract

Membangun perpustakaan yang profesional bisa diusahakan salah satunya melalui penerapan standar perpustakaan. Dalam praktiknya penerapan standar perpustakaan tidak selalu mudah apalagi dalam rangka menuju akreditasi perpustakaan. Tulisan ini mengangkat pengalaman yang dilakukan perpustakaan di lingkungan Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama yaitu Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Manado dan Perpustakaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam melakukan self assessment menggunakan standar perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dan praktik baik dalam menyiapkan perpustakaan melakukan akreditasi perpustakaan. Instrumen yang dipakai untuk melakukan self assessment ini sepenuhnya diambil dari Standar Nasional Indonesia untuk Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan keadaan perpustakaan tersebut. Instrumen yang ditampilkan dalam tulisan ini meliputi Fungsi Perpustakaan, Koleksi, Pengorganisasian Materi Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Pengelola, Layanan Perpustakaan, Organisasi Perpustakaan, Gedung, Perlengkapan, Anggaran, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pendahuluan

Berbicara tentang perpustakaan selalu menarik perhatian. Bukan hanya sebagai institusi pengelola karya manusia tetapi juga ada banyak kajian yang bisa lahir dari sini. Diantaranya adalah ketika berbicara tentang bagaimana perpustakaan itu dikelola secara

profesional. Menyoal kata professional ini, tidak terlepas dari pembicaraan mengenai perpustakaan yang dikelola sesuai standar yang pada akhirnya untuk mencapai perpustakaan yang berkuallitas.

Seperti apakah sesungguhnya perpustakaan yang berkualitas itu. Harsono (2019: 7) sedikitnya menyebutkan ada tiga indikator untuk mengetahui hal ini: *Compliments* yaitu Prestasi Kerja menuju kepuasan customer (internal & Eksternal), *Recognitions* yaitu Pengakuan formal dari lembaga terpercaya di bidangnya, dan *Continuous Improvements* yaitu Perbaikan berkelanjutan dan berinovasi menuju efisiensi.

Untuk mencapai ke arah yang berkualitas tersebut, tentu diperlukan usaha-usaha maksimal. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah harus dikelola secara profesional, terukur, dan terarah dengan sistem yang baku. Sistem baku yang dimaksud adalah sistem standardisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang kompeten. Hal ini tentunya juga harus sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 yang menegaskan menggunakan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang ditetapkan Perpustakaan Nasional untuk menjadi acuan. Kata kunci di sini adalah Standardisasi Perpustakaan.

Standardisasi perpustakaan diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan perpustakaan yang professional. Standar ini ada beberapa macam, ada yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional dan ada pula yang dihasilkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Namun demikian, dalam kenyataannya, berbagai standar yang telah ditetapkan tidak selalu mudah dilaksanakan oleh perpustakaan. Salah satu cara yang dipakai untuk mengetahui sejauh mana suatu standar telah dilaksanakan adalah melalui akreditasi perpustakaan.

Timbul pertanyaan, bagaimana perpustakaan menyiapkan diri menuju akreditasi perpustakaan? Inilah pertanyaan yang akan dijawab penulis melalui paparan dalam artikel ini. Penulis mengambil contoh pengelolaan perpustakaan khusus di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yaitu Perpustakaan Balai Diklat Keakamaan Manado dan Perpustakaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Jakarta. Penulis akan memaparkan *self assessment* kedua perpustakaan ini sebagai praktik baik dalam rangka menyiapkan diri menuju perpustakaan yang berstandar dan terakreditasi.

Studi Literatur

Merujuk pada fungsi perpustakaan, Evans, Intner, dan Weihs (2011:7) menjelaskan bahwa pada umumnya perpustakaan mempunyai sembilan fungsi dasar, salah satunya adalah melakukan organisasi informasi agar informasi yang dibutuhkan pemustaka dapat ditemukan lokasinya dengan mudah. Tentu hal ini senada dengan salah satu poin yang memang tertera dalam standar pengelolaan perpustakaan.

Perpustakaan Khusus

Pada intinya perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang mempunyai kekhususan dalam hal informasi dan penggunaannya. Lebih lanjut dikatakan dalam standar nasional perpustakaan khusus (SNI 7496:2009) bahwa perpustakaan khusus salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya

Menurut Sulistyio Basuki (1993) Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga

negara, lembaga penelitian, organisasi masa, militer, industri maupun perusahaan swasta. Sementara itu tugas Perpustakaan Khusus pada instansi pemerintah dinyatakan dalam standar nasional perpustakaan khusus (SNI 7496:2009) sebagai berikut:

1. menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan materi perpustakaan dan akses informasi;
2. mengumpulkan terbitan dari dan tentang lembaga induknya;
3. memberikan jasa perpustakaan dan informasi;
4. mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan;
5. meningkatkan literasi informasi.

Fungsi Perpustakaan Khusus secara umum sama dengan perpustakaan lain yakni fungsi penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi. Namun demikian perpustakaan khusus memiliki peran besar sebagai mitra lembaga induknya dan pusat informasi khusus terutama berhubungan dengan penelitian dan pengembangan.

Standar Perpustakaan

Standar seperti disebut dalam UU No.20 Tahun 2014 [tentang Standardisasi dan](#)

Penilaian adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sementara itu Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum NKRI (PP 24/2014) Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa standar perpustakaan adalah standar yang digunakan perpustakaan dalam melakukan kegiatan tata kelola perpustakaan.

Akreditasi Perpustakaan

Menurut O' Brian (2010), akreditasi perpustakaan adalah proses jaminan mutu yang dikendalikan oleh standar, kebijakan, dan prosedur pada sebuah perpustakaan. Senada seperti yang disampaikan Young (1979) bahwa: *the accreditation process is designed primarily to encourage the institution with its evaluation of itself and then to validate what the institution says about itself.*

Sementara itu menurut Nur Cahyono (2013), akreditasi adalah rangkaian seluruh kegiatan dalam proses pemberian sertifikat oleh badan/lembaga akreditasi yang kompeten dan terpercaya, sebagai tanda pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian (LPK) seperti lembaga sertifikasi (LS Produk/Kompetensi), laboratorium, lembaga inspeksi dsb, telah memenuhi persyaratan baku dan kompeten untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Secara sederhana dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan Penilaian Kesesuaian yaitu suatu kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Tujuan akreditasi perpustakaan adalah untuk mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu secara terus-menerus memperbaiki efektivitas dan berkomitmen untuk melaksanakan sistem manajemen mutu dan mau menjadi lebih baik (*continual improvement*).

Sementara itu Nur Cahyono (2013) menjelaskan bahwa tujuan akreditasi perpustakaan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (pustaka) terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan

perpustakaan yang bersangkutan yang pada akhirnya menurut Ratminto, setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima jasa pelayanan.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *self assessment* terhadap pengelolaan perpustakaan khusus dengan menggunakan penelitian kuantitatif eksploratif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner yang diambil dari instrumen standar pengelolaan perpustakaan khusus instansi pemerintah. Sementara itu pendekatan eksploratif ditujukan untuk menjelajahi hal-hal yang belum diketahui sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Manado dan Perpustakaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan perpustakaan khusus yang berada di bawah naungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Perpustakaan ini dikelola untuk memberikan informasi khusus mengenai Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan segala informasi yang berhubungan dengannya.

Pada prinsipnya kedua perpustakaan ini memberikan pelayanan kepada pengguna secara umum, hanya dalam pelaksanaannya pengguna kedua perpustakaan ini adalah mereka-mereka yang mempunyai minat terhadap studi atau kajian kelitbang dan kediklatan. Hal ini dikarenakan koleksi yang ada di kedua perpustakaan ini “melulu” mengenai segala macam kajian keagamaan dan juga kediklatan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana kedua perpustakaan ini mengelola perpustakaan sesuai standar, maka dibuatlah instrumen berdasarkan standar pengelolaan perpustakaan khusus, yang memandu pengelola perpustakaan atau pustakawan di kedua perpustakaan ini melakukan peninjauan atau *self assessment* terhadap dirinya sendiri dalam melakukan pengelolaan perpustakaan.

Ada sebelas pernyataan atau indikator yang penulis cantumkan pada tabel 1. Keseluruhan pernyataan atau indikator tersebut bernilai 100. Tiap pernyataan atau indikator memiliki

Berdasarkan instrumen yang penulis sebar di kedua perpustakaan ini dalam rangka melakukan *self assessment*, berikut ini adalah persentasi dari masing-masing pernyataan atau indikator yang ada.

Fungsi Perpustakaan

Gambar 1. Fungsi Perpustakaan

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
1	Fungsi Perpustakaan	1. Menyediakan materi perpustakaan dan akses informasi bagi lembaga induknya.	1.8	1.8
		2. Menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya	1.8	1.8
		3. Menyelenggarakan pendidikan pengguna perpustakaan	1.8	0
		4. Menyelenggarakan kegiatan literasi/melek informasi untuk pengembangan kompetensi SDM lembaganya	1.8	1.8
		5. Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif minimal 1 kali setahun	1.8	1.8
JUMLAH			9.00	7.20

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator fungsi perpustakaan terdiri dari 5 variabel, yaitu:

1. Menyediakan materi perpustakaan dan akses informasi bagi lembaga induknya.
2. Menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya
3. Menyelenggarakan pendidikan pengguna
4. Menyelenggarakan kegiatan literasi informasi untuk pengembangan kompetensi SDM lembaga induknya
5. Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif minimal 1 kali setahun

Dari penilaian terhadap 5 variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 1, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 7,2%. Penyelenggaraan pendidikan pengguna perpustakaan menjadi hal yang perlu di perhatikan oleh perpustakaan LPMA. Hal ini kurang mendapat perhatian karena beberapa

kemungkinan diantaranya pengunjungnya masih sedikit dan kurangnya promosi perpustakaan.

Koleksi Perpustakaan

Gambar 2. Koleksi Perpustakaan

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
a.	Koleksi Dasar	1. Memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1000 judul/2000 eksemplar dalam bidang kekhususannya (sebutkan jumlah yang dimiliki)	0.9	0.9
		2. Sekurang-kurangnya 80% koleksinya terdiri dari subyek/disiplin ilmu tertentu sesuai kebutuhan instansi induknya dan 10% dari jumlah koleksinya merupakan koleksi mutakhir	0.9	0.9
		3. Menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya	0	0.9
b.	Jenis koleksi, sekurang-kurangnya meliputi :	1. Buku yang terkait di bidangnya	0.9	0.9
		2. Serial/Terbitan Berseri	0.9	0.9
		3. Koleksi Referensi	0.9	0.9
		4. Laporan	0.9	0.9
c.	Penambahan Koleksi	Sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul pertahun atau minimal 100 judul pertahun	0	0
d.	Pencacahan & Penyiangan	1. Pencacahan 3 tahun sekali (stock opname)	0	0.9
		2. Penyiangan 1 tahun sekali	0	0
JUMLAH			5.40	7.20

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator koleksi perpustakaan terdiri dari 4 variabel dengan 11 sub variabel, yaitu:

- Koleksi
 - Perpustakaan khusus instansi pemerintah memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 judul dalam bidang kekhususannya.
 - Sekurang-kurangnya 80% koleksinya terdiri dari subyek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.
 - Menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya

- Jenis koleksi, sekurang-kurangnya meliputi:
 - Buku yang terkait di bidangnya;
 - Serial
 - Koleksi referensi
 - Laporan
- Penambahan Koleksi
 - Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul per tahun atau minimal 100 judul per tahun dipilih mana yang paling besar.
- Pencacahan & Penyiangan
 - Perpustakaan melakukan pencacahan koleksi sekurang-kurangnya 3 tahun satu kali.
 - Perpustakaan melakukan penyiangan koleksi sekurang-kurangnya 1 tahun satu kali.

Dari penilaian terhadap indikator dan variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 2, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 5.4% dan LPMA 7,2%. Variabel yang perlu mendapatkan perhatian pada kedua perpustakaan ini adalah pengembangan koleksi perpustakaan dan penyiangan perpustakaan. Masalah pengembangan koleksi ini memang terkendala dengan anggaran pengadaan koleksi yang belum diprioritaskan.

Tetapi sebenarnya ini tidak menjadi kendala manakala setiap perpustakaan di lingkungan Balitbangdiklat Kemenag berjibaku untuk mengupayakan pengumpulan produk internal dalam kerangka serah simpan karya ceak dan karya rekam lembaga. Namun hal ini tidak berjalan dengan mulus diantara penyebabnya karena komitmen dan kesadaran para pengelola perpustakaan untuk terus mengupayakan hal tersebut.

Sementara itu penyiangan belum bisa dilakukan karena memang tidak ada koleksi yang perlu disiangi karena keterbatasan koleksi yang ada. Walaupun dalam prakteknya banyak juga koleksi yang sudah tidak update, bahkan perlu ditinjau kembali keberadaannya.

Pengorganisasian Materi Perpustakaan

Gambar 3. Pengorganisasian Materi Perpustakaan

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
3	Pengorganisasian materi perpustakaan menggunakan:	1. Pedoman deskripsi bibliografis	2.3	2.3
		2. Bagan klasifikasi	2.3	2.3
		3. Pedoman tajuk subyek	2.3	2.3
		4. Pedoman penentuan tajuk entri utama	2.3	2.3
JUMLAH			9.20	9.20

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator pengorganisasian materi perpustakaan terdiri dari 5 variabel yaitu:

- Pedoman deskripsi bibliografis; Bagan klasifikasi; Pedoman tajuk subjek; dan Pedoman penentuan tajuk entri utama.

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 3, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9,2% dan LPMA 9,2%. Kedua perpustakaan ini sudah menggunakan pedoman-pedoman pengolahan dan klasifikasi perpustakaan yang standar. Hal ini menunjukkan pengelola perpustakaan sudah paham akan tata cara dan pedoman yang digunakan dalam pengolahan bahan perpustakaan.

Sumber Daya Manusia
Gambar 4. Sumber Daya Manusia

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
4	Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM minimal 3 orang, 1 kepala perpustakaan, 1 tenaga pustakawan, 1 tenaga teknis	0	3
		2. Perbandingan jumlah SDM minimal 1:2 yaitu 1 tenaga pustakawan, 2 tenaga teknis	0	3
		3. Pengembangan SDM, secara terprogram melalui pendidikan formal, non formal dan pengembangan di bidang kepustakawanan & penjenjangan kedinasan	3	3
JUMLAH			3.00	9.00

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator Sumber Daya Manusia terdiri dari 4 variabel yaitu;

- Jumlah SDM minimal 3 orang, 1 kepala perpustakaan, 1 tenaga pustakawan, 1 tenaga teknis
- Perbandingan jumlah DM minimal 1:2 yaitu 1 tenaga pustakawan, 2 tenaga teknis
- Pengembangan SDM, secara terprogram melalui pendidikan formal, non formal dan pengembangan di bidang kepustakawanan & penjenjangan kedinasan

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 4, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 3% dan LPMA 9%. Masalah SDM memang menjadi perhatian dalam setiap kesempatan. Begitu pula pada pengelola perpustakaan di BDK Manado. Kelemahan ini menjadi salah satu sebab rendahnya standar pemenuhan

SDM yang kompeten. Namun demikian usaha perbaikan terus dilakukan diantaranya dengan pemenuhan kebutuhan pustakawan melalui cara inpasing.

Pengelola

Gambar 5. Pengelola

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
5	1. Kepala perpustakaan	Minimal S1 di bidang Ilmu Perpustakaan atau S1 di bidang lain ditambah diklat penyetaraan bidang perpustakaan	4,5	0
	2. Tenaga teknis	Yang diperlukan adalah tenaga teknis komputer, audio visual, ketatausahaan	4,5	4,5
JUMLAH			9,00	4,50

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator Pengelola terdiri dari 2 variabel di antaranya:

- Minimal S1 di bidang Ilmu Perpustakaan atau S1 di bidang lain ditambah diklat penyetaraan bidang perpustakaan
- Yang diperlukan adalah tenaga teknis komputer, audio visual, ketatausahaan

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 5, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 4,5%. Terlihat dari variabel ini bahwa pengelola perpustakaan di LPMA khususnya kepala perpustakaan tidak atau belum memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan yang diharapkan. Ini

sangat mungkin terjadi bahkan terjadi pula di beberapa perpustakaan lain di lingkungan Balitbangdiklat Kementerian Agama karena memang sejak awal kebutuhan SDM atau pengelola yang kompeten belum menjadi prioritas.

Layanan Perpustakaan

Gambar 6. Layanan Perpustakaan

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
Layanan Perpustakaan				
1.	Jam buka	Minimal 37,5 jam/minggu	1,4	1,4
6	Layanan yang diberikan meliputi :	1. Layanan baca ditempat	1,4	1,4
		2. Layanan sirkulasi	1,4	1,4
		3. Layanan kesiagaan informasi	1,4	1,4
		4. Layanan referensi	1,4	1,4
		5. Layanan penelusuran informasi	0	1,4
		6. Layanan bimbingan pengguna	1,4	1,4
JUMLAH			8,40	9,80


Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator layanan perpustakaan terdiri dari 2 variabel dan 6 sub variabel, yaitu:

- Jam buka perpustakaan sekurang-sekurangnya 37,5 jam per minggu.
- Layanan yang diberikan perpustakaan khusus instansi pemerintah meliputi : layanan baca di tempat; layanan sirkulasi; layanan kesiagaan informasi; layanan referensi; layanan penelusuran informasi; layanan bimbingan pengguna.

Dari penilaian terhadap variabel dan sub variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 6, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 8,4% dan LPMA 9,8%. Dari penilaian ini terlihat bahwa kedua perpustakaan ini sudah menerapkan hampir semua jenis layanan yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan LPMA layanan penelusuran informasi mampu berjalan dengan baik karena dimungkinkan adanya sejumlah peneliti yang memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dengan bantuan pustakawan. Sementara itu di perpustakaan BDK Manado, layanan ini tidak atau kurang berjalan bisa jadi karena para widyaiswara kurang memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dan informasi yang tersedia kurang *update*.

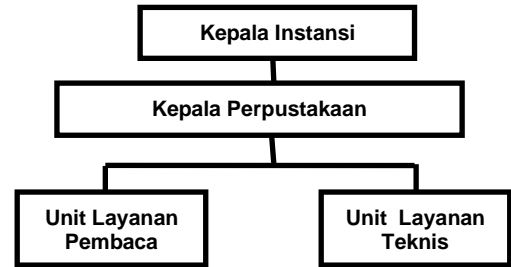
Organisasi Perpustakaan

Gambar 7. Organisasi Perpustakaan

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
Organisasi Perpustakaan				
1.	Status Kelembagaan	Bertanggung jawab kepada kepala instansi induk yang langsung membawahnya	4.5	4.5
7	Struktur Organisasi	 <pre> graph TD KI[Kepala Instansi] --> KP[Kepala Perpustakaan] KP --> ULP[Unit Layanan Pembaca] KP --> ULT[Unit Layanan Teknis] </pre>	4.5	4.5
JUMLAH			9.00	9.00

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator organisasi perpustakaan terdiri dari 2 variabel dengan 2 sub variabel di antaranya:

- Status kelembagaan
 - bertanggungjawab kepada kepala



instansi induk yang langsung membawahnya.

- Struktur organisasi

Dari penilaian terhadap variabel dan sub variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 7, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9%, dan perpustakaan LPMA 9%. Secara umum variabel ini dapat dipenuhi karena memang pengelola perpustakaan atau penanggung jawab perpustakaan melaporkan aktivitasnya kepada pimpinan lembaga. Kedua perpustakaan ini pun memiliki unsur-unsur pengelola perpustakaan seperti pada bagan di atas, hanya saja dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Gedung

Gambar 8. Gedung

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
8	Gedung	1. Menyediakan ruang untuk koleksi, staf dan penggunaanya minimal 100 m ²	1.8	1.8
		2. Memiliki gedung sendiri atau ruangan sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non Perpustakaan	1.8	1.8
		3. Memiliki ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca	1.8	1.8
		4. Lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman	1.8	1.8
		5. Denah tata ruang (<i>lay out</i>) perpustakaan perlu dipaparkan pada tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan	1.8	1.8
JUMLAH			9.00	9.00

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator gedung terdiri dari 5 variabel, yaitu:

- Menyediakan ruang untuk koleksi, staf dan penggunaanya minimal 100 m²
- Memiliki gedung sendiri atau ruangan sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non Perpustakaan
- Memiliki ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca
- Lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman
- Denah tata ruang (*layout*) perpustakaan perlu dipaparkan pada tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 8, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 9%. Standar yang tertera di sini hampir semua dapat dilaksanakan oleh kedua perpustakaan. Hal ini terlaksana karena memang adanya kesadaran dari lembaga bahwa perpustakaan hadir pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Balitbangdiklat Kementerian Agama sebagai mitra dan media yang saling bersinergi. Titik kritis yang masih perlu mendapat perhatian adalah ketika semua standar ini terpenuhi apakah keberlangsungan perpustakaan tetap terjaga atau juga apakah kemanfaatannya maksimal.

Untuk indikator perlengkapan, ada 3 variabel yaitu;

- Perpustakaan harus memiliki meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku dan meja jasa lainnya yang memenuhi standar konstruksi maupun jumlahnya
- Perpustakaan juga harus memiliki perlengkapan pendukung minimal 1 buah zice (kursi tamu), alat pengolah data mesin ketik atau komputer, mesin fotokopi dan kendaraan operasional

- Perpustakaan harus memiliki alat komunikasi minimal telepon dan faximile

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 9, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 9%. Standar ini mampu dipenuhi oleh kedua perpustakaan ini. Memang terlihat secara fisik perpustakaan ini berusaha menampilkan kesan perpustakaan dengan penampilan dan penataan yang nyaman dan menarik buat pengunjung. Untuk poin ini pengelola perpustakaan sudah berusaha maksimal menuju standar yang diharapkan.

Anggaran

Gambar 10. Anggaran

NO	PERNYATAAN (Indikator)	STANDAR (Variabel)	BDK MANADO	LPMA
10	Anggaran	1. Secara rutin tersedia melalui anggaran badan induk dan dituangkan ke dalam pola anggaran tahunan organisasi.	4,5	4,5
		2. Perpustakaan perlu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak.	4,5	4,5
JUMLAH			9,00	9,00

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator anggaran terdiri dari 2 variabel yaitu:

- Anggaran perpustakaan secara rutin tersedia melalui anggaran instansi induk.
- Perpustakaan perlu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan

pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak.

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 10, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 9%. Ini artinya kedua perpustakaan sudah memiliki kesadaran dan dukungan lembaga induknya untuk penganggaran perpustakaan. Tetapi memang perlu dicermati dalam prakteknya bahwa anggaran ini terkadang sekedar ada atau masuk dalam usulan, tetapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

Dalam standar pengelolaan perpustakaan versi 1, indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah bukan bagian tersendiri tetapi masuk dalam Layanan. Namun Penulis memisahkan dan memunculkan secara tersendiri untuk memudahkan penilaian. Hanya ada 1 variabel yaitu:

- Perpustakaan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengadaan dan pengorganisasian materi perpustakaan, layanan sirkulasi dan informasi termasuk akses internet

Dari penilaian terhadap variabel di atas maka dihasilkan seperti pada gambar 11, persentase nilai perpustakaan BDK Manado 9% dan LPMA 9%. Penggunaan aplikasi perpustakaan memang menjadi

keharusan dan tidak bisa terelakkan. Kedua perpustakaan ini menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan walaupun berbeda nama. Hal ini tidak masalah ketika ada dukungan dari IT lembaga. Namun seringkali ketidaktersediaan IT yang bisa men-support perpustakaan menyebabkan kendala yang muncul tidak segera mendapat penanganan. Hal ini juga menjadi permasalahan mendasar semua perpustakaan di lingkungan balitbangdiklat Kementerian Agama. Upaya pertukaran data atau terbentuknya Katalog Induk Nasional menjadi tidak real time dan belum trintegrasi satu dengan lainnya.

Dari keseluruhan bobot yang diperoleh oleh masing-masing perpustakaan tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua perpustakaan ini mendekati standar yang dimodifikasi oleh penulis. Nilai standar perpustakaan yang didapat dari keseluruhan persentasi yang diperoleh kedua perpustakaan ini adalah BDK Manado 89% dan LPMA 91.9%.

Persentasi di atas menggambarkan bahwa kedua perpustakaan ini secara *self assessment* sudah berusaha melakukan upaya-upaya pengembangan perpustakaan agar mendekati standar. Walaupun usaha-usaha ini adalah sebuah latihan, tetapi memiliki dampak positif untuk

menggerakkan perpustakaan lainnya yang masih minim standar pengelolaannya untuk berpacu memperbaiki diri. Sekaligus ini adalah praktik baik sebagai upaya sederhana menuju perpustakaan yang terstandar. Melalui *self assessment* diharapkan ke depannya bisa melakukan penilaian dengan standar yang baku dan mengarah menuju akreditasi perpustakaan.

Kesimpulan dan Saran

Dalam sebuah institusi dalam hal ini adalah Balitbangdiklat Kementerian Agama, keberadaan perpustakaan khusus harus memberikan andil tersendiri bahkan mitra penting dalam aktivitas lembaga. Untuk itu perlu adanya sinergi yang kuat antara kebijakan dalam institusi dengan pengelola perpustakaan terutama untuk memberikan daya dukung dalam mencapai tujuan dan misi institusi.

Berdasarkan penilaian standar perpustakaan khusus yang telah dimodifikasi penulis, kedua perpustakaan ini secara umum telah melakukan tata kelola perpustakaan yang mendekati standar. Untuk itu kedepannya, kedua perpustakaan ini dapat diuji coba kembali dengan menggunakan standar sebenarnya yaitu SNI Pengelolaan Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah tahun 2009 ataupun SNP Perpustakaan Nasional tahun 2017, yang tentunya

membutuhkan persiapan jauh lebih matang lagi.

Nilai yang diperoleh kedua perpustakaan ini tentu menjadi energi yang baik bahkan praktik baik bagi perpustakaan lain di lingkup Balitbangdiklat Kemenag untuk juga melakukan latihan dan *self assessment* guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas sudah sejauh mana perpustakaan di kelola sesuai standar.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Nur. 2014. "Prosedur Akreditasi Perpustakaan", disampaikan pada acara Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip DI Yogyakarta, 11 Juni 2014.
- Cahyono, Nur. 2013. Kebijakan Nasional Pengembangan Perpustakaan di Indonesia Menuju Perpustakaan Terakreditasi. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, hlm. 1.
- Evans, G. Edward, Sheila S. Intner, and Jean Weihs. 2011. *Introduction to Technical Services*. California: Libraries Unlimited, hlm. 7.
- Harsono, Tyso. 2019. Akreditasi Perpustakaan: Menuju Perpustakaan Berkualitas, disampaikan pada Pertemuan Orientasi Perpustakaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Yogyakarta, 21 Maret 2019.
- Indonesia. 2009. Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah 7496. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Indonesia. 2014. Standar Nasional Perpustakaan PP No.24 Tahun 2014. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Indonesia. UU No.20 Tahun 2014 [tentang Standardisasi dan Penilaian](#)
- Indonesia. UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- O'Brian, Michael. 2010. Akreditasi Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Gramedia.
- Sulistyo-Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Young, Kenneth E. 1979. "New Pressures on Accreditation", *The Journal of Higher Education*, Vol. 50, No. 2, March-April 1979.